



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.663212/2025**



DS:0864-5399-8056-8631

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
4. Kode>Nama Satker : (663212) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG
- Sebesar : Rp. 276.470.000 (DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Jumlah Uang

Rp. 276.470.000
Rp. 276.470.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	276.470.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PALEMBANG (014) Rp. 276.470.000

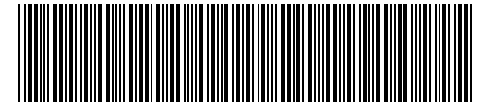
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0864-5399-8056-8631

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (663212) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

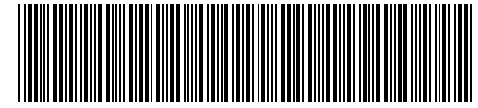
Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			276.470.000
Kegiatan	:	1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			276.470.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer			
		2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu			
		3. 01	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer			
		4. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu			
		5. 03	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan Militer			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	150,00	Perkara, Berkas Perkara	175.470.000
Rincian Output	:	01 BCA.U03	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	120,00	Perkara	171.960.000
		02 BCA.U05	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18	30,00	Perkara	3.510.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	15,00	Perkara, Berkas Perkara	101.000.000
Rincian Output	:	01 QCA.001	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer (PN)	15,00	Perkara	101.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0864-5399-8056-8631

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (663212) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG
Kewenangan : (KD)

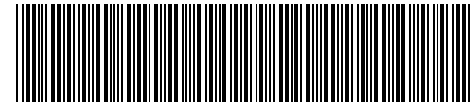
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
663212	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG	-	276.470	-	-	-	276.470		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	276.470	-	-	-	276.470		
1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	-	276.470	-	-	-	276.470		
1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	175.470	-	-	-	175.470	11 . 51	
01	RM	-	175.470	-	-	-	175.470	014@	
1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.51 SUMATERA SELATAN / KOTA PALEMBANG)	-	101.000	-	-	-	101.000	11 . 51	
01	RM	-	101.000	-	-	-	101.000	014@	
JUMLAH		-	276.470	-	-	-	276.470		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0864-5399-8056-8631

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (663212) PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	663212	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	14.498	14.498	43.198	39.798	17.938	41.238	14.498	33.708	14.488	14.488	28.125	276.470
		BELANJA BARANG	0	14.498	14.498	43.198	39.798	17.938	41.238	14.498	33.708	14.488	14.488	28.125	276.470
	005.05.BF.1058	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	0	14.498	14.498	43.198	39.798	17.938	41.238	14.498	33.708	14.488	14.488	28.125	276.470
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	14.498	14.498	43.198	39.798	17.938	41.238	14.498	33.708	14.488	14.488	28.125	276.470

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2025
IV A. B L O K I R**



DS:0864-5399-8056-8631

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [663212] PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
663212	PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	59.800
	52 Belanja Barang	Rp.	59.800
005.05.BF 1058	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		
1058.BCA	Perkara Hukum Perseorangan		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	9.900
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1058.QCA	Perkara Hukum Perseorangan		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	49.900
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.663212/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:0864-5399-8056-8631

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [663212] PENGADILAN MILITER I - 04 DI PALEMBANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775